1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisonal Cureh) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan II tahun 2026 (bulan April – Juni 2026).

Fluktuasi harga pada 33 jenis yang terdiri dari 20 jenis bahan pokok, 10 jenis barang penting dan tiga jenis komoditi unggul lainnya dengan jumlah 85 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta komoditi unggul lainnya secara keseluruhan. Dalam rentang waktu bulan April hingga Juni 2026 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian minyak goreng kemasan, daging ayam kampung, bawang peking, ikan tuna segar, ikan asin teri, garam yodium, kacang kedelai, kacang hijau, jeruk nipis, kentang, kelapa bulat, ketela pohon, mie instant, tahu mentah putih, pisang, susu dan tepung segi tiga biru serta LPG 3 kg stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Begitu juga dengan komoditas barang penting seperti semen, papan, paku, pupuk bersubsidi seperti SP 36, UREA dan ZA, demikian juga berlaku minyak nilam dan minyak pala juga relatif stabil.
2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi dan cenderung langka pada triwulan II periode April – Juni 2026 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama cabe merah keriting 78,86 persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp.26.020,- menjadi Rp46.540,- bulan Juni 2026), tomat 35,12 persen (harga rata-rata bulan April 2026 sebesar Rp.13.470,- meningkat signifikan menjadi Rp18.200 rata rata pada bulan Juni 2026). Ikan tongkol 14,81 persen (harga rata -rata bulan April 2026 Rp.38.500,-meningkat menjadi Rp.44.200,- bulan Juni 2026), Ko/ kubis 9,29 persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp7.320,- meningkat menjadi Rp8.000,- pada bulan Juni 2026). Bawang merah yaitu 5,95 persen (harga rata -rata bulan April 2026 Rp.37.000, meningkat menjadi Rp39,200,-pada bulan Juni 2026). Beras AB yaitu 3,95 Persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp15.000,- meningkat menjadi Rp15.592,- pada bulan Juni 2026). Beras cap panah meningkat 3,04 persen, Buncis 0,99 persen, dan gas LPG 12 kg 1,71 persen sementara untuk komoditas barang penting lainya seperti benih padi meningkat 60 persen, besi beton meningkat 9 persen hingga 18 persen, triplek 6,86 persen. Begitu juga dengan komoditas pekebunan dan komoditi unggulan mengalami kenaikan pada sub biji coklat kering 72,88 persen, emping melinjo 12,36 persen, dan biji pinang bulat 7,74 persen.
3. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan II tahun 2026 yaitu Jagung pipil yaitu 50 persen (harga rata-rata bulan April 2026

sebesar Rp12.000,- menurun signifikan menjadi Rp.6000,- rata rata pada bulan Juni 2026). Ikan bandeng 21,20 persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp 50.000,- turun menjadi Rp 39.400,- pada bulan Juni 2026), Cabe rawit hijau yaitu 15,88 persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp 40.420,- turun menjadi Rp34.000,- pada bulan Juni 2026). Ikan kembung yaitu 11,76 persen (harga rata-rata bulan April 2026 Rp50.000,- turun menjadi Rp47.600,- pada bulan Juni 2026). Telur ayam broiler yaitu 8,77 persen (harga rata-rata bulan April 2026, Rp.30.144,- turun menjadi Rp.27.500,- pada bulan Juni 2026). Kacang tanah turun 6,16 persen, Daging ayam broiler 5,12 persen, Minyakita 3,31 persen, Minyak Goreng Curah yaitu 1,33 persen. Sementara pada komoditas barang penting mengalami penurunan pada pupuk Mutiara NPK 15 yaitu 9,60 persen. Demikian juga pada komoditas Perkebunan penurunan harga harga terjadi pada jahe basah 7,41 persen dan biji kopi arabica 0,30 persen. Begitu juga pada komoditas unggul mengalami penurunan cengkeh 0,00 persen dan lada putih 1,92 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) pada periode Triwulan II Tahun 2026. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya ketersediaan pasokan beberapa komoditas strategis pada waktu tertentu, fluktuasi harga akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah, belum optimalnya kelancaran distribusi sebagai dampak kendala infrastruktur dan cuaca, serta masih perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi antar instansi maupun dengan pelaku usaha dan masyarakat.
2. Terganggunya pasokan perikanan akibat kondisi cuaca ekstrim, pasca bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan hasil tangkapan menurun, gagal panen dan rusaknya tambak di kabupaten Bireuen.
3. Terangguya pasokan pangan terutama, cabai merah, bawang merah telur disebabkan karena putusnya jalur distribusi dari sentra produksi, terjadinya kerusakan lahan/tanaman, penurunan sedangkan permintaan meningkat pasca bencana Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.
4. Terganggunya pasokan pangan komoditas beras disebabkan jalur distribusi masih terkendala, sehingga menyebabkan ongkos angkut lebih tinggi, lahan dan sarana prasarana (irigasi) pertanian padi rusak.
5. Terganggunya jaringan Air bersih minum, akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsong menyebabkan susahnya air bersih di Kabupaten Bireuen yang belum teratasi sepenuhnya sampai dengan sekarang.
6. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi juga masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kualitas data pendukung, serta belum optimalnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di

lapangan.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani secara terpadu melalui penguatan sinergi antaranggota TPID, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan program pengendalian inflasi agar sasaran pengendalian inflasi daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan II tahun 2026 dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Bupati Bireuen mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar serta menahan stok barang dalam menghadapi situasi Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen, nomor 300.2.2/1331 tahun 2025 pada tanggal 30 November 2025 dan berlaku sampai dengan sekarang;
2. Bupati Bireuen melakukan peninjauan langsung jalan putus akibat air pasang di Punjot Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen pada tanggal 19 April 2026;
3. Wakil Bupati Bireuen membuka secara resmi memimpin acara penanaman padi perdana di lahan rehabilitasi lahan sawah pada Bencana Hidrometerologi Aceh pada tanggal 25 April 2026 di Gampong Pulo Siron Kecamatan Kuta Blang Bireuen
4. Bupati Bireuen melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan tiga proyek infrastruktur vital yaitu jembatan krueng tingkeum kecamatan Kuta Blang, Jembatan Duplikasi Teupin Mane Kecamatan Juli terkait kelancaran distribusi barang serta peninjauan langsung ke lokasi tanggul darurat bendungan irigasi Pante Lhong Kecamatan Peusangan terkait rehabilitasi sarana pertanian pada tanggal 29 April 2026;
5. TPID Kabupaten Bireuen melakukan Rapat Koordinasi terkait Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sidak Pasar dan Pasar Murah menjelang HBKN Idul Adha 1447 H pada tanggal 11 Mei 2026 di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dan Bulog Subdrive Lhokseumawe di 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Jangka, Samalanga, Peusangan Selatan, Juli, kuala, Makmur, Kota Juang dan Gandapura pada tanggal 18 s/d 25 Mei 2026;
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan pasar murah bekerja sama dengan Bulog Subdrive Lhokseumawe di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Jeunib, Kuala, Jeumpa pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2026;

TPID Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bireuen melakukan Sidak Tera ulang meteran air di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Juang, Jeumpa dan Peudada pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2026 di pimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bireuen.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Bireuen berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), dengan program yang terlihat aktif di lapangan

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen menyelenggarakan kegiatan Pasar murah secara berkala menjelang Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan efektifitas meredam gejolak harga jangka pendek (terutama komoditas beras, telur, dan minyak goreng). Namun, program ini masih bersifat reaktif-insidental dan belum sepenuhnya berbasis pada sistem prediksi dini dan kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran sehingga volume pelaksanaan berkurang dari tahun sebeumnya;

2. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melakukan Rehabilitasi lahan sawah yang diklasifikasikan rusak sedang dan ringan akibat bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsong Aceh pada akhir tahun 2025;

3. Penguatan sektor produksi lokal melalui Gerakan Menanam misal pemanfaatan pekarangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan sinergi bersama Perum BULOG namun Produksi lokal masih rentan terhadap faktor eksternal seperti anomali cuaca dan keterbatasan infrastruktur pertanian dan pengairan yang terdampak pasca bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsong Aceh pada akhir tahun 2025;

4. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan Distributor untuk memantau harga, untuk memastikan stabilitas harga terkendali, menjamin ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan barang oleh distributor dalam mengahadapi bencana banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bireuen;

8.

5. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;

6. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;

7. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian Inflasi dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Normalisasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan dan akses pasar yang rusak akibat banjir/longsor supaya logistik berjalan lancar. Ini mencegah berkurangnya pasokan yang bisa mendorong inflasi.
1. Perlu memaksimalkan Rehabilitasi Lahan Pertanian dan Infrastruktur Irigasi yang terdampak Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya potensi defisit produksi beras lokal di periode mendatang jika rehabilitasi tidak rampung tepat waktu.
2. Melakukan rapat koordinasi secara aktif, rutin/berkala guna membahas dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan komunikasi aktif yang dapat mempererat kerjasama antar lintas sektor; pasca bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen;
3. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
4. Penguatan bantuan pangan melalui skema penyaluran bantuan beras SPHP ke 17 kecamatan terdampak bencana berkolaborasi dengan Bulog untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga terjangkau bagi masyarakat terdampak;
5. Pemulihan ekonomi pasca bencana mesti selaras dengan langkah mitigasi bencana seperti perbaikan drainase, penguatan tanggul, dan peringatan dini sehingga gangguan pasokan dan distribusi bisa dikurangi di masa datang di Kabupaten Bireuen;
6. Meningkatkan pemberdayaan produksi pangan lokal di daerah yang tidak terdampak bencana terutaman gerakan menanam komoditas pangan di halaman rumah atau di lahan cadangan agar pasokan lokal meningkat;
7. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan senagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi pasca bencana banjir dan tanah longsor;
8. Perlu adanya program atau kegiatan yang menyasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;

Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.

9.